



KABUPATEN BADUNG

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018

BAPPEDA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

UNIT 14 LANTAI 2
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP : (0361) 9009239 FAX : (0361) 9009239
MANGUPURA 80351

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Made Wira Dharmajaya, SH.,MM

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 26 Januari 2018

PIHAK KEDUA
BUPATI BADUNG



I NYOMAN GIRI PRASTA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA	3
A. Sasaran Strategis.....	3
B. Indikator Kinerja Utama dan Program	3
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	5
BAB III PENUTUP	6
Lampiran Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bappeda Kabupaten Badung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda

Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping melaksanakan tugas pokok, Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya peran serta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
6. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD
- b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD
- b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Jumlah *stakeholders* yang menyampaikan usulan kegiatan
- b. Persentase kehadiran *stakeholders* dalam Musrenbang

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas
- b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah:

- Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan Indikator Kinerja Utamanya adalah :

- Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan insfrastruktur wilayah

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Bappeda Kabupaten Badung akan melaksanakan program-program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.
3. Program Pengembangan Data/Informasi.
4. Program Perencanaan Tata Ruang.
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Indikator Kinerja Sasaran/ Utama
5. Strategi
6. Kebijakan
7. Program
8. Kegiatan

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Bappeda Kabupaten Badung menetapkan 6 Program dan 44 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.359.101.310,00 sebagaimana Perjanjian Kinerja terlampir.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018.

Perjanjian Kinerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan adanya dokumen Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 26 Januari 2018



KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG

I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	96% 91%
2.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPd	92% 100%
3	Meningkatnya peranserta <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah <i>stakeholder</i> yang menyampaikan usulan kegiatan b. Persentase kehadiran <i>stakeholders</i> dalam Musrenbang	49 pihak 85%
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas b. Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	97% 97%
5	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	86%
6	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	91%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 7.758.690.920,00	APBD
2.	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Rp. 9.273.000,00	APBD
3.	Program Pengembangan Data/informasi	Rp. 127.369.390,00	APBD
4.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 1.196.603.580,00	APBD
5.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Rp. 402.140.360,00	APBD
6.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp. 865.024.060,00	APBD



 BUPATI BADUNG



NYOMAN GIRI PRASTA



 KEPALA BAPPEDA

 KABUPATEN BADUNG



MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM

 Pembina Utama Muda

 NIP. 19670127 199201 1 001